

PENDAMPINGAN PEMETAAN POTENSI DESA SECARA PARTISIPATIF DI DESA TANJUNG LANJUT KECAMATAN SEKERNAN

M. Yusuf^{1*}, Syamsir², Suroyo³, Putri Andayani Br Sitepu⁴

^{1,3,4}Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

²Ilmu Hukum, Universitas Jambi

*Email: myusuf@unja.ac.id

ABSTRAK

Pada umumnya pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam perencanaan dan pengembangan desa berdasarkan potensi yang ada karena potensi yang dimiliki belum terpetakan dengan baik. Akibatnya pembangunan yang dilaksanakan seringkali kurang tepat sasaran dan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat. Dari kondisi tersebut, diperlukan pendampingan pemetaan potensi desa yang dapat dijadikan dasar bagi aparat dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Target luaran yang akan dicapai yaitu; publikasi pada jurnal pengabdian Sinta Peringkat 3. Pengabdian ini dilakukan dengan 3 cara berikut: 1) Pembekalan, Pada proses pembekalan ini juga dilakukan curah pendapat, diskusi, saling berbagi pengalaman. 2) Pelatihan, untuk menciptakan perilaku yang efektif antar anggota, dapat bekerja dalam tim secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan. 3) Pendampingan, dilakukan bertujuan untuk memetakan potensi yang dimiliki desa.

Kata Kunci: Pemetaan; Pendampingan; Potensi Desa.

PENDAHULUAN

NAWA CITA merupakan program Presiden Indonesia dimana salah satu poin dalam program tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran, yakni dengan memperkuat daerah dan desa. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu pembangunan desa sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh R Bintarto Desa dapat diartikan sebagai bentuk perwujudan geografis yang timbul akibat unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik dan kebudayaan setempat dalam suatu hubungan dan juga adany pengaruh timbal balik dengan daerah lainnya [1].

Pada dasarnya desa adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang ada di Indonesia dimana di dalamnya terdapat unsur organisasi termasuk rukun tetangga dan rukun warga yang secara keseluruhan organisasi tersebut merupakan tata pemerintahan berada dalam tananan yang disebut desa [2].

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [3].

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa memberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola desa bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi dianggap pelaksana yang hanya menjalankan kebijakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya [4].

Dalam menjalankan pembangunan desa tentunya diperlukan sebuah dasar dimana desa tersebut bisa dikembangkan kembali. Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah potensi yang dimiliki setiap desa yang ada di Indonesia. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia tentunya telah tersebar di setiap desa sehingga itu juga bisa menjadi pandangan bahwa setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda.

Potensi desa dapat dikatakan sebagai daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan

yang dimiliki oleh sebuah desa yang tentunya mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Namun pada kenyataannya beberapa desa belum mampu menggali potensi yang ada sehingga dibutuhkan arahan maupun pendampingan agar desa tersebut mampu menaikkan potensinya [5].

Pada umumnya sebuah potensi desa dapat dibedakan menjadi dua macam, yang pertama adalah potensi fisik, dimana potensi ini meliputi tanah, air, lingkungan geografis, iklim, hewan ternak, hingga sumber daya manusia yang dimiliki. Selanjutnya yang kedua merupakan potensi non fisik yang dimiliki suatu desa dimana potensi tersebut berupa corak masyarakat dan interaksinya, lembaga pendidikan, lembaga sosial, organisasi sosial masyarakat desa, dan aparatur desa serta pamong desa [6].

Dalam hal tersebut, partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting. Pembangunan sebuah desa tidak akan terwujud dan terlaksana dengan baik apabila tidak ada dukungan penuh dari masyarakatnya. Salah satu keberhasilan pembangunan desa dapat diukur dengan indikator yakni angka partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi melegitimasi keterlibatan langsung, tidak langsung, aktif dan pasif pada level lokal, regional dan nasional. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung, dimaknai sebagai dukungan dan kontribusi nyata masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah [7].

Salah satu desa yang memiliki potensi besar adalah desa Tanjung Lanjut yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Desa tersebut memiliki keragaman potensi yang belum terkelola dengan baik. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya di desa adalah dengan memulai pemetaan potensi desa [8]. Pemetaan potensi desa dapat mengklasifikasikan bagian-bagian desa untuk tujuan jangka panjang. Salah satu contoh potensi desa yang dapat dipetakan adalah kawasan wisata yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah desa guna menunjang perekonomian dan taraf hidup masyarakat setempat. Menurut Munasef pengembangan wisata merupakan bentuk usaha dan kegiatan

yang terkoordinasi untuk memancing wisatawan asing maupun regional dengan menyediakan sarana dan prasarana serta barang dan jasa yang di butuhkan oleh wisatawan [9].

Pemetaan potensi desa ini dapat menjadi langkah awal untuk memunculkan potensi unggulan desa, sehingga *output* kegiatan ini akan menjadi dasar pijakan bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pembangunan [10]. Saat ini, desa Tanjung Lanjut memiliki beberapa potensi yang belum terkelola dengan baik, salah satunya yakni potensi wisata. Desa ini belum memiliki aturan yang jelas mengenai cara yang tepat dalam mengelola potensi desa yang dimiliki. Pemerintah desa belum mampu membuat aturan dan mengarahkan masyarakatnya untuk menggali potensi yang ada, sehingga tata kelola desa dan potensinya belum maksimal.

Permasalahan yang juga dihadapi oleh pemerintah desa dalam upaya pembangunan desa adalah keterbatasan pengetahuan terhadap penataan ruang dan pemetaan potensi daerah. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah berupa pendampingan bagi pemerintah desa secara partisipatif dari berbagai kalangan masyarakat.

Dalam situasi ini pemerintah desa belum dapat membuat pemetaan desa dikarenakan masih memiliki kesulitan dalam menentukan prioritas perencanaan dan pembangunan desa. Perlunya arahan dan pendampingan bagi pemerintah desa Tanjung Lanjut dan dukungan penuh dari masyarakatnya agar mampu menggali potensi desanya. Pendampingan Desa mempunyai tugas sebagai fasilitator dan pendamping pemerintah desa serta masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, membina dan memberdayakan masyarakat desa, serta pelaksanaan pembangunan desa. Utamanya adalah bentuk pemberdayaan masyarakat desa [11]. Disamping itu, pemberdayaan masyarakat desa diartikan sebagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang berdampak terhadap ketahanan sosial budaya wilayah dan menjadi faktor penggerak pada tataran nilai sosial, budaya dan lingkungan [12].

Pada dasarnya pendampingan desa merupakan bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan arahan kepada pemerintah desa sehingga nantinya mampu menghasilkan *output* yang tepat sasaran. Pendampingan dapat diarahkan pada: 1). Penyediaan kondisi akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap

sumber-sumber daya yang ada. 2). Pengembangan potensi SDM maupun kelembagaan masyarakat, dan 3). Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan. Ketiga pendekatan ini menggunakan paradigma *people-based and people-oriented development* yang dilakukan melalui tukar pendapat, berdiskusi, musyawarah dan menentukan kebijakan pengelolaan desa wisata [13].

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan pendampingan pengelolaan potensi desa Tanjung Lanjut menggunakan tiga metode, yang pertama yakni pembekalan, pada proses ini dilakukan kegiatan tukar pendapat, diskusi santai, saling berbagi pengalaman dan ilmu, bercerita mengenai pariwisata yang telah maju sehingga meningkatkan motivasi masyarakat/kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembantuan desa wisata. Pada proses pembekalan diadakan musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pimpinan Rukun Warga (RW), Pimpinan Rukun Tetangga (RT), lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, dalam sosialisasi ini perlu juga disampaikan maksud dari pengembangan potensi desa, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan, dan tugas serta peran masing-masing.

Kedua adalah pelatihan yang dilakukan mencakup kegiatan pengorganisasian, dimaksudkan untuk menciptakan perilaku yang efektif, bekerja sama secara efisien dan efektif. Pelatihan pengorganisasian ini terdiri dari: a. Pelatihan identifikasi potensi desa, b. Pelatihan Menyusun draft secara partisipatif.

Yang terakhir adalah Pendampingan, dilakukan bertujuan untuk mengasah keterampilan dalam menggali potensi desa, kelompok sasaran memiliki wawasan dan kecakapan teknis mengelola kekayaan desa. Sasaran dari pendampingan adalah para petinggi desa dan pemuda desa yang mampu memahami bagaimana kondisi desa yang akan dikembangkan, sehingga nantinya hasil yang dicapai akan tepat sasaran [14].

HASIL YANG DICAPAI

Setiap desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dan menciptakan stabilitas nasional. Hal tersebut terjadi karena desa mampu mengelola dengan baik potensi yang dimiliki.

Pada dasarnya setiap desa tentu memiliki potensinya masing-masing. Namun dalam kenyataannya tidak menjamin setiap desa mampu mengelola potensi yang ada dengan baik. Keterbatasan sumberdaya manusia dan juga akses menjadi salah satu faktor dimana desa tersebut belum mampu mengelola potensi yang ada. Oleh karena itu diperlukan pendampingan agar desa potensi desa dapat terkelola dengan maksimal.

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki suatu desa, yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang pada dasarnya setiap masyarakat memiliki kebutuhan selalu mengalami perkembangan dan perubahan seiring berjalannya. Selanjutnya yakni identifikasi potensi, ini menjelaskan bahwa peluang dan sumberdaya itu akan selalu berkembang, oleh karena itu diperlukan kegiatan tersebut agar potensi dan sumberdaya yang ada akan bersifat laten. Dan yang terakhir merupakan proses yang paling penting hal ini dikarenakan sebuah upaya untuk mencari cara yang dapat menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada [15].

Desa Tanjung Lanjut merupakan salah satu desa yang memiliki potensi yang belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, diadakan pendampingan desa ini untuk memetakan potensi desa yang ada. Pendampingan desa merupakan suatu kegiatan dimana tim menggali potensi yang ada dengan cara mengumpulkan data desa dan dijadikan acuan untuk selanjutnya dianalisis hingga mendapatkan output yang diperlukan. Tujuannya adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Pada saat pelaksanaan, tim pendamping desa melakukan survey yang didampingi oleh aparat desa. Dimana survey ini dilakukan untuk melihat kondisi dan situasi yang ada pada desa tersebut, seperti kondisi bangunan sekolah, masjid, perkantoran desa, sampai wisata.

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data terhadap penduduk desa Tanjung Lanjut, yang meliputi jumlah penduduk, Jumlah KK, dan juga pengumpulan data geografis yang berkaitan dengan luas wilayah desa agar nantinya dapat dilakukan pemetaan dengan baik.

Langkah berikutnya yang ditempuh demi mengumpulkan data akurat yakni dengan mengumpulkan beberapa masyarakat desa untuk diajak berdiskusi mengenai keadaan desa yang mereka tempati. Kebutuhan dan keluhan disampaikan oleh beberapa masyarakat yang nantinya dapat disaring oleh tim sebagai bahan lanjutan untuk menggali potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Permasalahan yang banyak timbul yakni mengenai tata ruang desa yang belum teratur. Tidak adanya aturan khusus mengenai hal tersebut, sehingga mengakibatkan penyusunan pola wilayah yang kurang jelas. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya tim memberikan solusi untuk dibuatkan semacam peraturan desa. Dimana didalamnya mengatur mengenai semua tentang keadaan tata ruang desa, mulai dari bangunan dan infrastruktur, kemudian wisata serta peran masyarakat yang wajib ikut serta dalam membentuk tata kelola desa yang lebih baik.

Penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh tim pendamping desa dibuat benar-benar menyesuaikan dengan kondisi desa. Sehingga diharapkan nantinya ini bisa menjadi output yang tidak hanya sekedar tulisan, namun juga memiliki arah dan sasaran pembangunan desa yang tepat.

Tidak hanya itu saja, kegiatan pendampingan desa masih berlanjut, dimana tim merancang profil desa yang selanjutnya bisa digunakan oleh masyarakat sebagai gambaran umum desa. Profil desa dibuat berdasarkan kondisi nyata dari desa Tanjung Lanjut yang berisikan luas wilayah, jumlah penduduk, sarana pendidikan dan kesehatan, sosial politik masyarakat desa, potensi wisata dan hal-hal lain yang memiliki nilai sehingga pada profil desa tersebut tergambar dengan jelas.

Dalam penyusunan ranperdes dan juga profil desa tentunya memiliki hambatan-hambatan tersendiri. Jarak yang cukup jauh dari pusat kota dan akses yang kurang baik menjadi tantangan tersendiri saat menuju desa tersebut. Hal ini juga yang mengakibatkan kondisi desa kurang disorot oleh media. Tentunya dengan

jarak yang cukup jauh maka memerlukan biaya akomodasi yang tidak sedikit. Dengan budget yang ada tim harus mengatur agar pengeluaran masih tercukupi dengan biaya yang tersedia.

Dengan adanya peraturan desa tersebut akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan desa juga sekaligus sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, serta sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman. Kemudian dengan adanya profil desa yang mampu menggambarkan potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat dan komprehensif sehingga sangat penting untuk menunjang pembangunan desa yaitu sebagai data dasar yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendampingan desa pada desa Tanjung Lanjut ini membuahkan hasil yang bermanfaat untuk desa tersebut. Kegiatan yang diawali dengan pendampingan bersama masyarakat dan pemerintah desa menjadi rujukan utama dari proses pemetaan desa. Kegiatan Pemetaan desa yang dilakukan oleh tim mampu menjadi dasar dalam pembuatan peraturan dan profil desa. Dukungan dan peran serta masyarakat memberikan dampak besar dalam pembuatan peraturan desa, yang mana peraturan desa ini nantinya mampu mengarahkan desa Tanjung Lanjut menjadi sebuah desa yang memiliki dasar pengendalian dan pengawasan yang jelas.

Kemudian profil desa yang ada saat ini dirancang dengan memuat kondisi nyata desa Tanjung Lanjut beserta potensi yang ada sehingga bisa dijadikan sebuah acuan bagaimana kedepannya arah pembangunan desa berlanjut. Diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan ini taraf sosial dan perekonomian masyarakatnya dapat meningkat sehingga program dari pemerintah pusat yakni memulai pembangunan dari daerah terpinggir dapat terwujud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini sepenuhnya dibiayai oleh LPPM Universitas Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. W. Susyanti, "Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 12, no. 01, pp. 33–36, 2013, doi: 10.32722/eb.v12i1.650.
- [2] D. Prasetyo, *Membangun Desa Mandiri*. Pontianak: Cv Derwati Press, 2019.
- [3] A. Soleh, "Strategi Pengembangan Potensi Desa," *J. Sungkai*, vol. 5, no. 1, pp. 32–52, 2017, doi: 10.30606/js.v5i1.1181.
- [4] K. Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa," *Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 6, no. 1, pp. 135–143, 2020.
- [5] T. prasetyo hadi Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman," *J. Media Wisata*, vol. 02, no. 02, pp. 146–154, 2014.
- [6] L. Wulandari, "Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran," *J. BERDIKARI*, vol. 3, no. 1, pp. 55–66, 2017.
- [7] M. H. Susanti, "Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal," *Integralistik*, vol. 28, no. 01, pp. 29–39, 2017, doi: 10.15294/integralistik.v28i1.11809.
- [8] N. S. Yunas, "Impementasi Konsep Penta Helix Dalam Pembangunan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa Timur," *Matra Pembaharuan J. Inov. Kebijak.*, vol. 3, no. 1, pp. 37–46, 2019, doi: 10.21787/mp.3.1.2019.37-46.
- [9] A. M. Yuardani *et al.*, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendampingan Untuk Pengembangan Pariwisata Pada Desa Sungai Kupah," *J. Abdidas*, vol. 2, no. 2, pp. 176–185, 2021, doi: 0.31004/abdidas.v2i2.239.
- [10] R. albertin Putri, N. Hardiyanti, and K. Wijayanti, "Upaya Merintis Desa Wisata Melalui Pelatihan dan Penndampingan Masyarakat Di Desa Carang Rejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo," *J. ABDI*, vol. 05, no. 01, p. 60, 2019.
- [11] D. Triyanto, "Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Sudi Di Desa Tabu Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)," *J. Penelit. Sos. dan Polit.*, vol. 7, no. 2, pp. 56–62, 2018.
- [12] S. Ruwanti and N. S., "Pemetaan Potensi Desa Dalam Upaya Mengembangkan Desa Wisata Di Desa Pengujan Kabupaten Bintan," *Pros. Natl. Conf. Community Serv. Proj.*, vol. 2, pp. 32–37, 2020.
- [13] Andreas and E. Savitri, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir*. 2016.
- [14] A. Khirom, F. N. A. Soleh, S. Alfiyah, and E. O. A. Hidayah, "Pendampingan dan Pembuatan Videografi Wisata Desa Sebagai Sarana Promosi Desa Wisata Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan," *Pendalas J. Penelit. Tindakan Kelas dan Pengabd. Masy.*, vol. 01, no. 01, pp. 1–16, 2021.
- [15] S. S. Kusuma, D. Hamdani, D. Nugraha, Y. Nurhayati, and R. F. Ramadhan, "Pendampingan dan Pembuatan Video Profil Untuk Promosi Wisata Desa Cisantana Kabupaten Kuningan," *Empower. J. Pengabd. Masy.*, vol. 03, no. 02, pp. 81–88, 2020, doi: 10.25134/empowerment.v3i02.3035.